
STRATIFIKASI SOSIAL: PENONTON BIOSKOP DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD KE-20

SOCIAL STRATIFICATION: MOVIEGOERS IN THE DUTCH EAST INDIES IN THE EARLY 20TH CENTURY

¹Khaesyar Nisfhan Akbar Rosadi; ²Eric Pradana Putra

^{1,2}Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

¹khaesyar.nar@gmail.com; ²ericpradana98@gmail.com

 10.36869/pjhpish.v9i2.380

Diterima 01-08-2024; direvisi 19-11-2024; disetujui 02-12-2024

ABSTRACT

This article examines social stratification in Dutch East Indies society, specifically in relation to performing arts entertainment, such as moviegoing or 'gambar idoe' in cinemas during the early 20th century. The research investigates social stratification within the cultural context of cinema entertainment in the Dutch East Indies. The primary focus of this study is to uncover how social stratification shaped the behavior of moviegoers and to offer an overview of the social dynamics within cinema spaces at that time. The methodology employed is descriptive analysis, with stages that include data collection, data processing, analysis, and interpretation. The findings indicate the presence of a social hierarchy consisting of three classes: Europeans at the top, followed by other foreign groups, such as ethnic Chinese, in the middle, and the indigenous population at the bottom. This social stratification is reflected in differences in ticket prices, seating arrangements, film preferences, and movie theaters, which were all determined by class and economic status. This research provides valuable insights into how the rigid, hierarchical social structure of the Dutch East Indies was mirrored in its entertainment culture, and how it influenced social behavior and interactions during that period.

Keywords: social stratification; Dutch East Indies; cinema; idoe pictures; entertainment; audience behavior; early 20th century

ABSTRAK

Artikel ini membahas stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindia Belanda terkait hiburan seni pertunjukan berupa menonton film atau *gambar idoe* di bioskop pada awal abad ke-20. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk stratifikasi sosial dalam konteks budaya hiburan bioskop di Hindia Belanda. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi perilaku penonton bioskop serta memberikan gambaran tentang dinamika sosial di ruang bioskop pada masa tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tahapan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan adanya strata atau hierarki sosial yang terdiri dari tiga kelas atau golongan: penduduk Eropa di tingkat pertama, diikuti oleh penduduk asing lainnya seperti etnis Tionghoa di tingkat kedua, dan penduduk pribumi atau lokal yang berada di tingkat terakhir. Bentuk stratifikasi sosial ini tercermin dalam perbedaan harga tiket masuk, posisi tempat duduk, preferensi film, dan gedung bioskop yang diklasifikasikan berdasarkan kelas sosial dan kemampuan ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang struktur sosial yang kaku dan hierarkis di Hindia Belanda yang tercermin dalam budaya hiburan serta dampaknya terhadap perilaku dan interaksi sosial pada masa tersebut.

Kata kunci: stratifikasi sosial; Hindia Belanda; bioskop; gambar idoe; hiburan; perilaku penonton; awal abad ke-20

PENDAHULUAN

Kehadiran bangsa-bangsa asing, terutama Belanda, pada awal abad ke-20 telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika budaya hiburan di Hindia Belanda. Salah satu bentuk hiburan yang mengalami transformasi besar akibat pengaruh ini adalah seni pertunjukan film, atau yang lebih dikenal dengan istilah *gambar idoepp* di bioskop. Sejak diperkenalkan, bioskop dengan cepat memperoleh sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi sangat populer.

Pembahasan mengenai bioskop seringkali fokus pada sejarah bioskop itu sendiri mulai dari awal kemunculannya di Batavia hingga penyebarannya di kota-kota lain seperti Bandung, Semarang dan Surabaya. Selain itu, pembahasan bioskop juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri perfilman di Indonesia. Sebagai fenomena baru yang membawa perubahan dalam budaya hiburan, kemunculan bioskop di Indonesia juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di masa kolonial Belanda.

Kehidupan masyarakat pada masa kolonial Belanda mengalami stratifikasi sosial yang ketat. Stratifikasi sosial di Hindia Belanda dapat dikatakan kompleks, dipengaruhi oleh sistem kolonial yang membagi masyarakat berdasarkan hierarki rasial dan status ekonomi. Hierarki ini memperparah kesenjangan antara masyarakat pribumi dan Eropa, menciptakan pembatasan yang mendalam dalam akses terhadap fasilitas hiburan modern seperti bioskop (Aditya, F., dkk, 2024:24403).

Dalam pandangan Max Weber, stratifikasi sosial merupakan struktur kompleks yang melibatkan tiga dimensi utama: kelas, status, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial tidak hanya terbatas pada perbedaan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang membentuk hierarki sosial. Ketiga dimensi ini saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk stratifikasi sosial yang mendalam dan seringkali tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari (Weber, M., 1968:302-305).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk stratifikasi sosial dalam konteks budaya hiburan bioskop di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Fokus utamanya adalah mengungkap bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi perilaku penonton bioskop dan memberikan gambaran tentang dinamika sosial di ruang bioskop pada masa tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan tahapan penelitian yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penafsiran data.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran bioskop dalam masyarakat Hindia Belanda serta implikasinya terhadap perkembangan budaya populer di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali aspek hiburan dari bioskop, tetapi juga menggambarkan bagaimana ruang publik seperti bioskop dapat mencerminkan struktur sosial yang lebih luas dan kompleks.

METODE

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tahapan-tahapan penelitian yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penafsiran data (Ashmore, 2003:158-160).

Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan dan kredibel. Sumber utama meliputi literatur, seperti artikel akademik dan buku, yang membahas stratifikasi sosial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 serta dinamika budaya menonton film di bioskop. Dokumentasi berupa foto dan video, juga dikumpulkan untuk memberikan konteks visual mengenai stratifikasi sosial dalam ruang bioskop. Selain itu, arsip iklan dari surat kabar yang terbit pada periode tersebut menjadi sumber data penting untuk memahami bagaimana bioskop dipromosikan dan diterima oleh masyarakat.

Setelah data terkumpul, data diolah dengan cara mengorganisasi dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan topik utama penelitian. Data dari literatur, dokumentasi, dan arsip diolah untuk

mengidentifikasi pola yang berhubungan dengan stratifikasi sosial dan budaya menonton film di bioskop. Proses ini mencakup penyaringan informasi yang relevan dan pengelompokan data sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya adalah analisis data, pada tahapan ini data yang telah dikategorikan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara stratifikasi sosial dan perilaku penonton bioskop. Analisis ini mengevaluasi bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi akses, preferensi, dan pengalaman menonton bioskop serta dinamika sosial yang memengaruhi budaya menonton bioskop pada periode tersebut.

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh stratifikasi sosial terhadap penonton bioskop di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lapisan sosial memengaruhi pengalaman menonton bioskop, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi kebiasaan dan persepsi masyarakat terhadap hiburan pada masa itu. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai stratifikasi sosial dan dampaknya terhadap penonton bioskop di Hindia Belanda awal abad ke-20.

PEMBAHASAN

Kehidupan Masyarakat Hindia Belanda Awal Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami transformasi yang signifikan akibat dari urbanisasi yang sangat pesat. Banyak penduduk desa yang berpindah ke kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang. Urbanisasi tersebut kemudian memicu pembentukan kelas menengah baru dan meningkatkan dinamika sosial serta budaya di kota-kota tersebut (Achdian, 2015:148). Stratifikasi sosial secara jelas terlihat dalam tatanan masyarakat Hindia Belanda pada masa itu, masyarakat terbagi dalam kelas-kelas: penduduk Eropa berada di

tingkat pertama, kemudian diikuti oleh penduduk Tionghoa yang berada di tingkat kedua, dan penduduk pribumi atau lokal berada pada tingkatan terakhir, sering kali terpinggirkan dan menghadapi diskriminasi rasial yang mendalam (Ricklefs, 2001:195).

Kesenjangan ekonomi sangat jelas terlihat, golongan elit Eropa dan beberapa individu yang berasal dari etnis Tionghoa yang sukses menikmati kehidupan yang sejahtera, sedangkan masyarakat dari golongan pribumi atau lokal mengalami hidup dalam yang mengenaskan (Feith & Castro, 2002:112-113). Kesenjangan ini kemudian menciptakan perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, memperdalam stratifikasi sosial yang ada.

Dalam kehidupan sosial dan budaya, pengaruh Barat semakin terasa dengan masuknya budaya baru, terutama dalam bentuk hiburan seperti menonton film di bioskop. Akses untuk menikmati hiburan tersebut kemudian dibatasi oleh kelas sosial. Kelas menengah dan atas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menikmati hiburan ini, sementara kelas bawah terabaikan (Cribb, 1991:78-79), mencerminkan dan memperkuat perbedaan kelas sosial yang ada. Meskipun urbanisasi membawa perubahan dalam struktur sosial dan memperkenalkan modernisasi, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap menjadi isu utama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Hindia Belanda.

Secara keseluruhan, transformasi yang terjadi pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda memperlihatkan dinamika yang kompleks antara modernisasi dan kesenjangan sosial. Urbanisasi dan pengaruh Barat membawa perubahan signifikan, namun juga memperlebar kesenjangan yang ada, menciptakan tantangan besar bagi masyarakat pribumi atau lokal. Transformasi ini bukan hanya mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperlihatkan perjuangan masyarakat dalam menghadapi diskriminasi dan mencari keadilan di tengah perubahan yang pesat.

Sejarah Kehadiran Bioskop di Hindia Belanda

Kehadiran film dan bioskop merupakan salah satu perkembangan penting dalam sejarah hiburan. Film pertama kali diperkenalkan oleh Lumière bersaudara pada 28 Desember 1895 di Paris, dengan alat yang dikenal sebagai *Cinématographe* (Musser, 1994:77). Penemuan ini kemudian segera menyebar ke seluruh Eropa dan dunia, menandai era baru dalam industri hiburan visual serta mengubah cara orang menikmati hiburan.

Di Hindia Belanda, isu kehadiran bioskop pertama kali tercatat pada iklan dalam surat kabar *Bintang Betawi* tanggal 30 November 1900, sebagai berikut: “De Nederlandsche Bioscope Maatscapij (Maatscapij – Gambar Idoep) memberi tahoe bahoewa lagi sedikit hari ija nanti kasih liat tontonan amat bagoes jaitoe gambar gambar idoep dari banjak hal hal jang belon lama telah kedjadian di Europa dan di Afrika Selatan.”

Iklan dalam surat kabar *Bintang Betawi* tanggal 30 November 1900 tersebut menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan hadir hiburan baru berupa *gambar idoep* yang sebelumnya sudah populer di Eropa dan Afrika Selatan. *Gambar Idoep* yang dimaksud adalah film tanpa suara atau ‘film bisu’ yang ditayangkan dalam sebuah pertunjukan bioskop.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1900, surat kabar *Bintang Betawi* kembali menerbitkan iklan tentang kehadiran *gambar idoep*, sebagai berikut: "Besok hari Rebo, 5 Desember 1900 PERTOENDJOKAN JANG BESAR PERTAMA didalem satoe roemah di Tanah Abang. Kebondjae (manage) moelai poekoel toejoe malem. Harga tempat klas satoe f2, harga tempat klas doewa f1 dan harga tempat klas tiga f0,5."

Dalam iklan tersebut dijelaskan bahwa *gambar idoep* pertama kali ditayangkan pada hari Rabu, 5 Desember 1900, di sebuah kediaman di daerah Kebonjae, Tanah Abang. Penayangan dimulai dari pukul 19.00 WIB hingga selesai. Tarif masuk atau harga tiket berbeda-beda, tergantung pada kelasnya: kelas satu dikenakan tarif f2, kelas dua f1, dan kelas tiga f0,5. Dari iklan tersebut, dapat diketahui bahwa bioskop pertama kali hadir di Hindia

Belanda pada 5 Desember 1900 (Jauhari, 1992:4).

Pada masa itu, bentuk awal bioskop masih sangat sederhana. Bioskop terdiri dari sebuah layar besar berbahan kain putih yang dibentangkan pada dua tiang bambu yang ditancapkan ke tanah dan disorot oleh sebuah proyektor analog. Bioskop sederhana ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan 'layar tancap'. Melihat antusiasme masyarakat terhadap hiburan baru ini, bioskop kemudian diselenggarakan di lapangan terbuka (*openlucht bioscoop*) dengan dinding gedek dan atap terbuat dari seng. Bioskop ini sering berpindah tempat, seperti di Deca Park (Gambir), Mangga Besar (Lokasari), Lapangan Beos, dan Los Pasar Tanah Abang (Tjasmadi, 2008:6).

Di balik kesuksesan dan popularitas bioskop, terdapat dua pebisnis Belanda yang menjadi pelopor masuknya *gambar idoep* dan berdirinya bioskop di Hindia Belanda, yaitu Tuan Scharwsz dan Tuan Talbot. Kedua pebisnis tersebut merupakan saingan dalam industri hiburan bioskop. Tuan Scharwsz menyajikan pertunjukan di dalam sebuah rumah di Tanah Abang Kebonjae, yang kelak dikenal sebagai The Royal Bioscoop. Sementara itu, Tuan Talbot dan rekan-rekannya selalu mempertunjukkan film di dalam bangunan berdinding bambu (bilik) beratap seng yang didirikan di lapangan terbuka dan sering berpindah-pindah (Jauhari, 1992:5).

Pada tahun 1903, Tuan Scharwsz secara resmi mendirikan bioskop di kediamannya dengan nama The Royal Bioscoop. Bioskop ini merupakan bioskop profesional pertama yang menawarkan pelayanan istimewa khusus untuk kelas elit Eropa (Tjasmadi, 2008:6). Pendirian The Royal Bioscoop oleh Tuan Scharwsz kemudian menjadi cikal bakal berdirinya berbagai bioskop permanen yang tersebar di Batavia, Bandung, Jogjakarta, dan daerah lainnya di Hindia Belanda (Ruppin, 2016:190).

Bioskop kemudian menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Hindia Belanda dan pada tahun 1920-an mulai menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Hindia Belanda. Perkembangan ini tidak hanya memengaruhi

kalangan elit, tetapi juga merambah ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Pada periode ini, bioskop menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat populer, dan permintaan akan pertunjukan film terus meningkat (Jauhari, 1992:12).

Selain itu, industri bioskop di Hindia Belanda tidak hanya dikuasai oleh pebisnis etnis Eropa. Banyak pelaku bisnis dari etnis Tionghoa juga turut terlibat dalam industri ini. Para pengusaha Tionghoa berperan penting dalam memperluas jangkauan bioskop dan meningkatkan kualitas layanan. Mereka mendirikan bioskop-bioskop baru, mengimpor film, dan berinvestasi dalam peralatan yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada perkembangan pesat bioskop di Hindia Belanda (Tjasmadi, 2008:8).

Kehadiran etnis Tionghoa dalam industri bioskop memberikan warna baru dan mencerminkan dinamika sosial serta ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, peminat bioskop mulai mengalami penurunan karena Masyarakat merasa bosan melihat *gambar idoeep* yang monoton tanpa alur cerita, selain itu gambar yang disajikan pada masa itu juga belum sempurna, masih sering terdapat getaran dan goyangan yang membuat mata menjadi sakit (Jauhari, 1992:5).

Untuk mengatasi masalah tersebut, para pebisnis bioskop kemudian mencoba menurunkan harga tiket masuk untuk dapat menarik datangnya penonton. Hal tersebut kemudian berhasil dilakukan, dengan adanya penurunan harga tiket masuk, antusias masyarakat untuk menonton bioskop kembali meningkat (Erwantoro, 2014:288-289).

Pada penghujung tahun 1929 dan awal tahun 1930, masyarakat disambut kabar gembira terkait kehadiran film bersuara (*talking pictures*) pertama di Hindia Belanda. Surabaya menjadi kota pertama yang menayangkan film bersuara (*talking pictures*) pertama berjudul *Fox Follies* yang ditayangkan di Bioskop Princesse Schouwburg pada 26 Desember 1929 (Hutari, 2017:107).

Film bersuara (*talking pictures*) kemudian juga hadir di Bioskop Luxor, Bandung pada 15 Februari 1930 dengan film

berjudul *The Rainbow Man*. Inovasi baru dalam industri bioskop ini kemudian berhasil menarik perhatian masyarakat dan mendatangkan banyak penonton yang antusias ingin melihatnya (Kunto, 2014:246).



Gambar 1. Bioskop Princesse Schouwburg di Surabaya tahun 1926

Sumber: MBC Interactive Archive



Gambar 2. Poster dan adegan dalam film *The Rainbow Man* (1929)

Sumber: imdb.com

Pada tahun 1950, kolonisasi Belanda berakhir dan Hindia Belanda berganti nama menjadi Indonesia. Perfilman nasional Indonesia berhasil memproduksi film *Darah dan Doa* karya Usmar Ismail. Film tersebut merupakan film pertama yang diproduksi oleh anak bangsa. Sebelumnya, telah ada film lokal berjudul *Loetoeng Kasaroeng* yang diproduksi pada tahun 1927. Namun, film tersebut dapat dikatakan tidak murni karya anak bangsa, karena masih dikerjakan oleh orang Belanda (Mitalia, G.R., 2012:53).

Dengan demikian, film *Darah dan Doa* menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman nasional Indonesia, menandai era baru di mana industri film dikelola dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri.

Keberhasilan ini juga membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dari industri perfilman Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini.

Pada masa selanjutnya, bioskop semakin berkembang dan mengalami dinamika serta pasang surut. Pada awalnya, bioskop menjadi hiburan utama masyarakat dan pusat budaya populer. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan seperti perubahan teknologi, perubahan selera penonton, dan munculnya media hiburan baru seperti televisi telah mempengaruhi keberlangsungan bioskop. Meskipun demikian, bioskop tetap beradaptasi dengan menghadirkan inovasi visual dan audiovisual serta layanan baru untuk menarik kembali minat penonton.

Peran bioskop dalam menyajikan film-film berkualitas serta sebagai tempat bertemunya masyarakat untuk menikmati seni peran dan cerita visual tetap menjadi aspek penting dari budaya Indonesia. Keberlanjutan industri bioskop bergantung pada kemampuannya untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta keinginan penonton masa kini.

Stratifikasi Sosial dalam Ruang Bioskop

Kondisi masyarakat di Hindia Belanda pada awal abad ke 20 tentu tidak lepas dari kebijakan stratifikasi sosial yang ditegakkan oleh pemerintah kolonial. Corak stratifikasi sosial di Hindia Belanda didasarkan pada perbedaan kekuasaan, ras dan ekonomi. Tak terkecuali dalam pemutaran film di bioskop, masyarakat kolonial tetap memisahkan penonton berdasarkan hierarki sosial yang berlaku. Pada awal perkembangan film, masyarakat Belanda dan eropa menjadi kelas teratas yang menguasai sumberdaya dalam rangka pemutaran film di Hindia Belanda. Tak hanya berperan sebagai penonton, para pengusaha pemutaran film awal-awal adalah orang dari kalangan Belanda seperti Tuan Talbot dan Tuan Scharwsz di Batavia. Sementara untuk golongan kelas dua merupakan masyarakat etnis Tionghoa dan Arab. Sementara untuk kelas tiga adalah golongan pribumi. Masyarakat kelas bawah pada dasarnya juga diperbolehkan untuk

menonton pemutaran film tersebut (Ardiyanti, 2017:65).

Perusahaan pemutaran film biasanya akan membagi tiket menjadi tiga kategori kelas. Berdasarkan iklan yang diwartakan di surat kabar *Bintang Betawi*, tiket kelas satu dihargai 2 gulden, kelas dua 1 gulden dan kelas tiga 0,5 gulden. Harga tiket kelas satu yang terbilang cukup mahal pada masa itu, secara otomatis hanya dapat dibeli oleh kalangan Belanda-eropa dan kerabatnya. Sementara untuk tiket kelas dua, harganya masih terbilang tinggi sehingga secara tersirat kelas ini diperuntukan untuk penonton dari kalangan pengusaha Tionghoa dan Arab. Pada akhirnya hanya tersisa tiket kelas tiga yang diperuntukkan untuk masyarakat pribumi tertentu yang cukup kaya untuk membeli tiket tersebut (Ardianti, 2017:166).

Perbedaan kelas pada tiket tersebut juga berpengaruh terhadap fasilitas dan posisi duduk pada saat pemutaran film berlangsung. Orang pribumi sebagai pemegang tiket kelas tiga tidak akan mendapat kursi seperti penonton kelas satu dan dua, melainkan duduk di bawah dengan atau bahkan tanpa alas. Luppin (2015) bahkan menyatakan jika tiket untuk orang pribumi seringkali disebut sebagai kelas kambing. Tidak seperti tiket kelas satu dan dua yang disediakan tempat duduk di depan layar, kelas kambing akan duduk terpisah yaitu di balik layar. Posisi tersebut memastikan para pribumi tidak terlihat oleh penonton kelas atas (Luppin, 2015:19-20).

Meskipun mendapat diskriminasi tersebut para pribumi menganggap menonton film di bioskop sebagai sebuah kebanggaan. Tidak sembarang pribumi yang sanggup menonton film di bioskop, hanya kalangan pegawai setempat dan priyayi yang cukup terpendang di masa itu. Golongan ini berusaha untuk mengidentifikasikan diri mereka sedekat dan semirip mungkin dengan golongan Belanda-Eropa agar diakui secara sosial. Oleh karena itu, menonton bioskop pada masa itu bukan hanya sebagai sarana hiburan semata namun juga sebagai legitimasi status sosial bagi masyarakat. Tak hanya pribumi yang menganggap menonton bioskop di periode awal berkembangnya sebagai sebuah kebanggaan. Bagi kalangan masyarakat kelas

dua yaitu orang asing dari etnis Tionghoa dan Arab juga menjadikan bioskop sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada orang Belanda-Eropa. Tentunya ada banyak orang penting dan pejabat Belanda yang dapat mereka temui untuk sekedar menyapa sampai bahkan membicarakan tentang bisnis disela menonton film. Bagi para pengusaha asing tersebut memiliki kenalan atau hubungan dekat dengan orang-orang Belanda akan mempermudah usahanya di wilayah kolonial. Bagi warga Belanda-Eropa bioskop menjadi tempat bertemu sesama warga Belanda di wilayah kolonial. Misalnya saja para pengusaha perkebunan dan pejabat Belanda di Kota Medan akan datang ke bioskop bersama keluarganya untuk menonton film terbaru dan membahas topik-topik lain mulai dari bisnis hingga tren yang sedang berkembang di Hindia Belanda (Batubara, 2020:18).

Pada perkembangan selanjutnya, industri pemutaran film dan bioskop semakin berkembang pesat. Lebih banyak pengusaha Belanda maupun Tionghoa yang membuka bioskop baru di kota-kota besar Hindia Belanda. Dengan dibukanya banyak bioskop baru, para pengusaha berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan daya tarik bioskopnya. Para pengusaha juga berusaha mendapatkan pelanggan dengan cara membuat jadwal rutin dan menetap di satu tempat. Biasanya bioskop tersebut dibuat dalam bangunan masif maupun konstruksi tradisional yang terbuat dari kayu atau bambu. Dengan pola menetap tersebut, beberapa bioskop memiliki penonton mayoritas dari golongan tertentu menyesuaikan dengan lokasi sekitarnya. Misalkan saja di Batavia terdapat Bioskop Elite dan Royal yang dianggap sebagai bioskop kelas atas bagi warga Belanda-Eropa, Bioskop Orion dan Shanghai di daerah Glodok membuat mayoritas penontonnya berasal dari etnis Tionghoa, lalu ada Bioskop Capitol yang kebanyakan penontonnya adalah orang pribumi (Agustin dkk, 2023:30, Safitri, 2022:33).

Selanjutnya pada masa bioskop yang mulai menetap, diskriminasi penonton dari golongan pribumi masih belum banyak berubah. Malahan tiket untuk penonton pribumi digeser menjadi golongan kelas

empat. Tiket kelas empat sebenarnya muncul akibat pengusaha bioskop memperluas kesempatan bagi penonton dari kalangan Tionghoa dan Arab untuk dapat membeli tiket kelas dua dan tiga. Selain itu, penonton pribumi masih mendapatkan posisi duduk di belakang layar sehingga mereka menikmati tayangan film secara *mirror* atau terbalik. Penerapan empat kelas tiket termasuk posisi duduk pribumi ini berlaku secara universal di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Bandung dan Semarang. Sebagai bentuk peningkatan fasilitas bioskop, setidaknya sudah disediakan bangku panjang yang terbuat dari kayu atau bambu untuk penonton pribumi (Luppin, 2015:184).

Pada beberapa bioskop di Surabaya terdapat pemisahan kembali penonton pribumi menjadi golongan pribumi elite (*priyayi*) dan kuli. Tidak diketahui secara pasti apakah kedua golongan tersebut berada di posisi tempat duduk yang berbeda. Namun Luppin (2015) menemukan sumber yang menyatakan adanya pertunjukan layar tancap tahun 1914 untuk merayakan pembukaan pabrik baru di Jawa Tengah dimana pejabat pribumi dan pejabat Belanda duduk bersama di depan layar. Sementara pribumi yang lain posisinya tetap duduk di belakang layar. Contoh lain terjadi di Medan pada sebuah pembukaan bioskop baru tahun 1909 dimana pengelola mengizinkan para pengusaha Tionghoa dan pribumi elite untuk ikut hadir di acara tersebut untuk menghindari adanya potensi kerusuhan massa. Meskipun tidak diketahui apakah mereka duduk di posisi yang sama atau berbeda dengan kalangan Belanda-Eropa (Luppin, 2015:21).

Bioskop-bioskop di Hindia Belanda kemudian berkembang menjadi bangunan megah dengan fasilitas mewah. Beberapa bioskop mulai dilengkapi dengan ruang tunggu yang memiliki berbagai ornamen dan poster-poster film. Selain itu, terdapat juga instrumen musik seperti gramophone dan piano untuk menyambut para penonton kelas atas. Beberapa bioskop juga menyediakan kios-kios yang menjual rokok serta makanan atau minuman. Ruangan bioskop disesuaikan dengan standar Eropa serta kursi untuk penonton seluruh kelas ditingkatkan.

Pengaturan kursi kemudian dibuat semakin tinggi ke belakang seperti *amphiteater*. Hal ini bertujuan agar penonton di setiap kelas tidak terhalang pandangannya ke layar (Luppin, 2015:184).

Bioskop-bioskop mulai memperkenalkan kategori kelas baru yaitu kelas elite (*luxury class*). Pertama, *box seats* yang diperuntukan bagi penonton dari elite Belanda-Eropa sebagai kelas yang lebih tinggi dari kelas satu. Secara harfiah *box seats* merupakan kursi yang memiliki sekat di bagian sampingnya, sehingga penonton di dalamnya tidak terganggu dengan penonton lain yang ada di sekitarnya. Bagi kalangan elite menonton di kelas *box seats* akan membuatnya lebih tinggi dari aspek status sosial bahkan dari sesama orang Belanda-Eropa. Selain itu, dengan duduk di *box seats*, para elite dan keluarganya dapat menonton dengan suasana yang lebih intim (Luppin, 2015:134).

Selanjutnya bioskop juga memperkenalkan kursi balkon sebagai kelas yang paling tinggi. Kelas ini biasanya jumlahnya terbatas dan tentu lebih mahal dari kelas *box seats*. Kelas ini menawarkan pengalaman menonton film dari atas balkon yang terletak di sisi-sisi ruangan bioskop. Penonton dapat menonton film dengan pandangan yang bebas tanpa terhalang apapun. Penonton juga dapat melihat penonton lain yang berada di bawahnya. Selain itu, kelas ini juga disediakan kursi dan meja terbaik sehingga penonton dapat menikmati film dengan nyaman (Luppin, 2015:184-185).

Para pengelola bioskop juga membuat berbagai fasilitas penunjang lain yang mendukung stratifikasi dan diskriminasi terhadap masyarakat dari kelas-kelas tertentu. Beberapa bioskop diketahui membedakan pintu masuk dan keluar untuk penonton asing (Belanda, Tionghoa, dan Arab) dengan pribumi seperti di East Java Bioscope (1913) di Surabaya. Secara teknis perbedaan pintu masuk dan keluar tersebut bertujuan untuk membuat alur penonton tidak menumpuk serta mengarahkan langsung penonton ke areanya masing-masing. Namun begitu, perbedaan pintu masuk menjadi penegasan adanya diskriminasi dari kalangan Belanda-Eropa sebagai golongan masyarakat teratas terhadap

kalangan pribumi sebagai kelas yang paling rendah. Para penonton pribumi seakan tidak boleh terlihat oleh penonton golongan atas dari awal masuk bahkan hingga saat pemutaran film, yang mana pribumi harus duduk di balik layar. Perbedaan area antara penonton asing dan pribumi tersebut diduga mengakibatkan beberapa fasilitas seperti ruang tunggu yang berisi kios-kios dan toilet hanya digambarkan berada di area pintu masuk untuk penonton asing. Sementara itu, area pintu masuk untuk penonton pribumi tidak dijelaskan memiliki fasilitas yang serupa. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa penonton dari pribumi bisa jadi mendapat fasilitas ruang tunggu dan toilet yang tidak semewah penonton asing atau bahkan tidak ada sama sekali (Luppin, 2015:182).

Pada beberapa daerah dengan tradisi islam yang kuat, pengelola bioskop mempunyai kebijakan untuk memisahkan penonton berdasarkan gender. Kebijakan tersebut selain untuk menghormati nilai-nilai islam juga untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang terjadi kepada wanita. Penerapan kebijakan tersebut biasanya berlaku hanya untuk tiket kelas bawah. Tentu saja hal ini memiliki poin diskriminasi dengan menganggap bahwa kalangan selain orang kelas atas memiliki potensi untuk melakukan tindak kejahatan dan membuat kerusuhan di dalam bioskop (Luppin, 2015:19).

Pada peralihan antara masa kolonial dan awal kemerdekaan, stratifikasi dalam lingkup bioskop masih terlihat meskipun tidak begitu tegas. Stratifikasi sosial pada masa ini tampaknya tidak lagi didasari oleh perbedaan etnis dan kuasa namun berdasarkan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, corak stratifikasinya relatif terbuka dengan potensi mobilisasi individu antarkelas menjadi lebih mudah. Pada rentang tahun 1950 hingga 1960 masyarakat di Surabaya membedakan bioskop menjadi Kelas A dan B. Bioskop Kelas A tiketnya lebih mahal dari kelas B dan menampilkan film-film barat yang dianggap memiliki *value* tinggi serta wawasan yang mendidik. Label tersebut membuat bioskop kelas A hanya diakses oleh penonton dengan tingkat Pendidikan dan ekonomi yang baik. Sementara itu, bioskop kelas B

menampilkan film-film dari semenanjung Malaya, India dan Mandarin. Dengan harga tiket yang lebih murah dan genre yang lebih *relate* serta menghibur, membuat penonton dari kelas yang lebih rendah memilih menonton di bioskop kelas B (Mitalia & Devi, 2012:54).

Kondisi masyarakat di Surabaya yang masih terbagi menjadi dua golongan dalam mengakses bioskop, dapat menjadi salah satu indikasi adanya stratifikasi sosial baru yang berlaku umum di masyarakat Indonesia pasca kolonial. Meskipun penerapannya sudah tidak terlalu tegas, namun motif-motif stratifikasi tetap dapat dirasakan salah satunya dalam perkembangan industri bioskop di Indonesia.

Beberapa Bangunan Bioskop Kolonial

1. Bioskop Grand Theater

Bioskop Grand Theater secara administratif terletak di Jalan Kramat Raya, RT 4/RW, Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Pada bagian utara berbatasan dengan Jalan Kramat Bunder, bagian barat berbatasan dengan Jalan Kramat Raya, dan bagian timur serta selatannya berbatasan dengan gedung dan ruko-ruko bagian timur serta selatannya berbatasan dengan gedung dan ruko-ruko.

Bioskop ini berdiri pada awal abad ke-20 dengan nama awal REX Theater. Seiring berjalannya waktu, nama bioskop ini berubah menjadi Grand Theater. Bioskop Grand Theater merupakan bioskop kelas menengah yang berfungsi sebagai pusat hiburan di kawasan Senen, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat kegiatan sosial dan budaya di Batavia (Jakarta). Bangunan bioskop ini awalnya berdiri kokoh dan memiliki tiga teater berbeda dalam satu gedung (Pratama, R. S., & Gandha, M. V., 2022:796).

Pada tahun 1950, Bioskop Grand Theater mengalami perkembangan pesat dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1980. Namun, pada awal abad ke-21, tepatnya sekitar tahun 2015-2016, bioskop ini mengalami kebangkrutan akibat modernisasi

dan kekalahan dalam persaingan bisnis (Kendrix, J., & Mustaram, A. L., 2022:2513).

Pada tahun 2020, Bioskop Grand Theater mengalami kebakaran akibat dari aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law. Hingga saat ini, bangunan bioskop Grand Theater masih dapat dijumpai namun sudah dalam keadaan tidak terawat. Beberapa bagian bangunan juga sudah mengalami kerusakan dan hancur akibat dari kebakaran.



Gambar 3. Bioskop Rex di Jakarta tahun 1939

Sumber: universiteitleiden.nl



Gambar 4. Bioskop Grand Theater Jakarta tahun 2020

Sumber: Khaesyar, 2020

2. Bioskop Metropole

Bioskop Metropole secara administratif terletak di Jalan Pegangsaan Barat No. 21, RW. 1, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi bioskop ini strategis, berbatasan dengan berbagai fasilitas penting yang menunjang kenyamanan pengunjungnya. Di bagian utara, bioskop ini berbatasan dengan Food Court Megaria, menyediakan pilihan kuliner sebelum atau setelah menonton film. Bagian barat berbatasan dengan Jalan

Pegangsaan Timur, yang merupakan salah satu jalan utama di kawasan tersebut. Di sisi timur, bioskop berbatasan dengan Metropole Office Building, menambah kesan urban dan modern pada area ini. Sementara itu, bagian selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro, yang menghubungkan bioskop dengan area-area lain di Jakarta.



Gambar 5. Bioskop Metropole 1952 dan 2020
Sumber: Perpustakaan & Khaesyar

Bioskop Metropole, yang resmi beroperasi sejak 1951, mengalami beberapa kali perubahan nama dan rebranding, dari Megaria pada tahun 1960 hingga Metropole XXI seiring perkembangan industri perfilman (Ariyani Sari Fajarwati dkk, 2020:114). Pada tahun 1993, bangunan ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya kelas A oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mempunyai nilai penting dalam arsitektur dan sejarahnya (Ariyani Sari Fajarwati dkk, 2020:117). Kini, bioskop ini dikelola oleh PT. 21 Cineplex, tetap mempertahankan karakter historisnya meskipun telah dimodernisasi.

3. Bioskop Majestic

Bioskop Majestic secara administratif terletak di Jalan Braga No.1, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada bagian utara berbatasan dengan gedung BCCF – Simpul Space 4, bagian barat berbatasan dengan Gedung Merdeka, bagian timur berbatasan dengan Jalan Braga, dan bagian selatannya berbatasan dengan gedung Societeit Concordia.

Bioskop Majestic dibangun oleh Technisch Bureau Sunda pada tahun 1925 dengan gaya arsitektur Art Deco yang dirancang oleh Prof. C.P Wolff Schoemaker (Dulleman, C. V, 2018:290). Bentuk

rancangan bangunan bioskop Majestic cukup unik karena berbentuk seperti kaleng biskuit, dan bangunan bioskop ini juga sempat dijuluki sebagai bangunan dengan bentuk *blikken trommel* yang berarti kaleng timah (Pratomo, A. B, 2017:77).



Gambar 6. Bioskop Majestic tahun 1938
Sumber: universiteitleiden.nl

Selain bentuknya yang unik menyerupai kaleng biskuit, bangunan bioskop Majestic juga mempunyai daya tarik pada bagian fasadnya. Terlihat bahwa pada bagian fasad bioskop, Prof. C.P Wolff Schoemaker merancang bangunan tersebut dengan memadukan unsur tradisional atau lokal dan menyesuaikan fisik bangunan dengan iklim tropis di Indonesia (Pratomo, A. B, 2017:77). Unsur lokal yang terdapat pada bangunan Bioskop Majestic berupa penggunaan ornamen berbentuk kala yang berada pada bagian atas pintu masuk, serta ornamen berbentuk sulur-sulur daun atau kapital yang terdapat pada bagian atas dari pilar-pilar yang berada dibagian pintu masuk bioskop (Dulleman, C.V, 2018:291).



Gambar 7. Bioskop Majestic tahun 2020
Sumber: Khaesyar, 2020

Bioskop Majestic adalah bioskop yang dirancang khusus bagi elite Belanda yang

tinggal di sekitar Jalan Bragaweg (Jalan Braga). Bioskop Majestic juga merupakan bioskop pertama yang menayangkan film buatan Indonesia berjudul *Loetoeng Kasaroeng* pada tahun 1926 oleh NV Java Film Company (Pikiran Rakyat, 2018, Februari 1).

Bioskop Majestic sempat mengalami beberapa perubahan nama menjadi Bioskop Dewi pada tahun 1960-an. Kemudian nama bioskop Majestic digunakan kembali seperti semula. Pada sekitar tahun 2000-an, Bioskop Majestic mengalami kebangkrutan dan gedung ini kemudian beralih fungsi menjadi gedung Asia Afrika Cultural Centre (AACC) (Katam, 2005:232). Sekitar tahun 2010-2012 bangunan bioskop Majestic berganti nama menjadi New Majestic dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya golongan A. Kini, bangunan bioskop Majestic difungsikan sebagai gedung serba guna yang dikelola oleh PD JASWITA JABAR dengan nama De Majestic (Pratomo, A.B, 2017:79).

4. Bioskop Radio City

Bioskop Radio City secara administratif terletak di Jalan Dalem Kaum, Bolonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada bagian utara berbatasan dengan Jalan Dalem Kaum, bagian barat berbatasan dengan Warteg Wisata Jaya, bagian timur berbatasan Jalan Bolonggede, dan bagian selatannya berbatasan dengan pemukiman warga.



Gambar 8. Bioskop Radio City tahun 1953

Bioskop Radio City didirikan pada tahun 1930 dan pada masa itu merupakan salah satu di antara tiga bioskop yang berdiri di dekat alun-alun Bandung. Pada tahun 1960-an,

bioskop Radio City berganti nama menjadi bioskop Dian. Seiring berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi, bioskop Dian tidak mampu bersaing dengan beberapa bioskop lain yang sudah dilengkapi oleh teknologi yang lebih mumpuni. Hal tersebut kemudian mengakibatkan bioskop ini terpaksa untuk berhenti beroperasi di tahun 1980-an (Katam, 2005:235).



Gambar 9. Bioskop Radio City tahun 2020

Sumber: Khaesyar, 2020

Setelah berhenti beroperasi, bangunan bioskop Dian kemudian beralih fungsi menjadi arena futsal, namun tidak bertahan lama, dan menjadi terbengkalai. Saat ini, bangunan bioskop Dian sudah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya golongan A oleh Pemerintah setempat. Pada bagian depan bangunan bioskop Dian saat ini difungsikan sebagai warung atau tempat makan oleh para pedagang makanan cepat saji. ini difungsikan sebagai warung atau tempat makan oleh para pedagang makanan cepat saji.

5. Ria Theater

Bioskop Ria secara administratif terletak di Jalan Sudirman No.15, Proklamasi, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Pada bagian utara berbatasan dengan Bank Mandiri (Cabang Sudirman Pematangsiantar), bagian barat berbatasan dengan eks Rumah Dinas Bupati Simalungin, bagian timur berbatasan dengan Taman Bunga Kota Pematangsiantar, dan bagian selatannya berbatasan dengan Lapangan Haji Adam Malik Pematangsiantar.

Bioskop Ria dibangun pada tahun 1953 dengan nama awal REX dan mulai beroperasi sejak tahun 1955, kemudian berganti nama

menjadi Bioskop Ria. Bioskop ini berhenti beroperasi dan ditutup pada tahun 2003. Berdasarkan surat PD AIJ bernomor 296/AIJ/X/2020 yang ditujukan untuk penertiban administrasi dan pemanfaatan aset-aset, diketahui bahwa Bioskop Ria termasuk dalam aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada di bawah naungan PD AIJ Sumut (Intan, D. dkk, 2022:189). Saat ini, bangunan bioskop Ria beralih fungsi menjadi restoran cepat saji.



Gambar 10. Bioskop Rex
Sumber: Yanray Parada Purba, 2012



Gambar 11. Bioskop Ria tahun 2023
Sumber: Google Map, 2023

PENUTUP

Pada awal abad ke-20, bioskop di Hindia Belanda tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai cerminan mendalam dari stratifikasi sosial yang mengakar dalam masyarakat kolonial. Bioskop secara jelas menunjukkan bagaimana hierarki sosial, yang didasarkan pada ras, kekuasaan, dan status ekonomi, tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi

juga dipertahankan dan diperkuat melalui budaya menonton film.

Dalam struktur sosial kolonial Hindia Belanda, kelompok Eropa berada di puncak hierarki sosial. Mereka menikmati akses eksklusif ke fasilitas bioskop terbaik dengan harga tiket tertinggi, menciptakan pengalaman menonton yang mewah dan nyaman. Di bawah kelompok Eropa, etnis Tionghoa menempati posisi sosial menengah, mendapatkan akses yang lebih baik dibandingkan dengan pribumi, meskipun masih terbatas. Kelompok pribumi sering kali harus menonton film dari area yang kurang nyaman, yang dikenal sebagai kelas kambing. Diskriminasi ini menunjukkan bahwa menonton film bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga simbol status sosial yang mencerminkan kesenjangan signifikan di masyarakat.

Transformasi bioskop dari layar tancap sederhana menjadi gedung-gedung mewah mengungkapkan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghapus stratifikasi sosial. Sebaliknya, modernisasi sering kali memperkuat diskriminasi yang sudah ada. Dengan kemunculan bioskop-bioskop mewah, kebijakan pemisahan berdasarkan kelas sosial menjadi lebih formal dan terorganisir. Misalnya, pintu masuk dan fasilitas ruang tunggu yang berbeda untuk masing-masing kelas sosial mencerminkan bagaimana diskriminasi dipertahankan dan terinstitusikan dalam budaya bioskop.

Di beberapa daerah dengan tradisi Islam yang kuat, pemisahan gender di bioskop juga menjadi norma, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi struktur sosial. Kebijakan ini mencerminkan bahwa hierarki sosial tidak hanya berbasis ras atau status sosial, tetapi juga melibatkan aspek budaya dan agama yang kompleks. Dalam hal ini, bioskop berfungsi sebagai medium yang memperkuat bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan.

Meskipun era kolonial telah berlalu, dampak dari stratifikasi sosial yang terbentuk selama periode tersebut masih terasa dalam industri bioskop di Indonesia. Perubahan bentuk diskriminasi dari berbasis ras ke berbasis kelas ekonomi dan pendidikan menunjukkan bahwa warisan ketidaksetaraan

sosial kolonial terus mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan menikmati hiburan. Dengan demikian, bioskop di Hindia Belanda berperan signifikan dalam memperkuat struktur sosial yang ada. Hiburan massa, seperti menonton film, tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga memperkuat hierarki sosial dalam masyarakat kolonial.

Perkembangan bioskop menggambarkan bagaimana modernisasi, hiburan, dan stratifikasi sosial saling terkait. Bioskop menciptakan ruang dimana kekuasaan dan status sosial ditentukan dan dipertahankan, bahkan di tengah perubahan sosial yang besar. Sebagai saksi bisu dari dinamika sosial yang kompleks, bioskop menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan dan diskriminasi menjadi faktor utama dalam membentuk pengalaman menonton dan kehidupan sosial pada masa itu.

Dengan demikian, jelas bahwa bioskop bukan hanya tempat hiburan, melainkan juga refleksi nyata dari struktur sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat kolonial. Sebagai institusi hiburan, bioskop berfungsi sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan stratifikasi sosial serta menunjukkan bagaimana warisan ketidaksetaraan sosial dapat berlanjut dan beradaptasi dalam konteks yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, A. (2015). Bergerak di ruang kota: Perkembangan masyarakat kota dan politik perkotaan di Hindia-Belanda awal abad ke-20. In T. Abdullah (Ed.), *Historiografi Indonesia: Orientasi Tema Dan Perspektif* (p. 148). Yogyakarta: Ombak.
- Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2), 24402-24407.
- Ariyani Sari Fajarwati, A., Sofiana, Y., Meliana, S., & Caroline, O. S. (2020). Kajian desain interior pada bangunan cagar budaya: Studi kasus bioskop Metropole XXI Jakarta. *Dimensi*, 16 (2), 1-15.
- Ardianti, H. (2017). Perfilman Indonesia: Perkembangan dan kebijakan sebuah telaah dari perspektif industri budaya. *Kajian*, 22 (2).
- Batubara, T. (2020). Memutar sejarah “gambar idoe” masa silam: Industri perfilman dan dampaknya di Medan pada era kolonial Belanda sampai Orde Baru. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1 (1).
- Cribb, R. (2000). *Historical Dictionary of Indonesia*. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Dulleman, C. v. (2018). *Arsitektur Tropis Modern: Karya dan Biografi C.P. Wolff Schoemaker*. Depok: Komunitas Bambu.
- Erwantoro, H. (2019). Bioskop keliling: Peranannya dalam memasyarakatkan film dan Manubhai minat masyarakat di Jawa Tengah pada masa awal kemerdekaan. *Neliti*.
<https://media.neliti.com/media/publications/291899-bioskop-keliling-peranannya-dalam-memasyarakatkan-film-dan-manubhai-minat-masyarakat-di-jawa-tengah-pada-masa-awal-kemerdekaan>
- Intan, D., Rijal, M., & Faisal, G. (2022). Revitalisasi gedung bioskop Ria di Kota Pematangsiantar dengan pendekatan arsitektur ekspresionis. *JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 5 (2), 188-195.
- Katam, S. (2005). *Album Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: NavPress Indonesia.
- Kendrix, J., & Mustaram, A. L. (2022). Pusat Ekonomi Kreatif Senen: Menghidupkan kawasan perdagangan di Senen. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(2), 2509- 2522.
- Mitalia, G. R. (2012). Dibalik layar perak: Film-film bioskop di Surabaya 1950-1970 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Musser, C. (1994). *The Emergence of Cinema: The History of Film in Europe*. Yale University Press.
- Pratama, R. S., & Gandha, M. V. (2022). SENEN HALL: Revitalisasi gedung Grand Theatre Senen. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban*,

- Perancangan, Arsitektur (Stupa), 4 (2), 793-806.
- Pratomo, A. B. (2017). Gaya arsitektur bioskop Majestic di Bandung. *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)* (pp. 77-80). Lhokseumawe: Prosiding Seminar Heritage IPLBI 2017.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Ruppin, Dafna. (2015). *The Komedi Bioscoop: The Emergence of Movie-going in Colonial Indonesia, 1896-1914*. Disertasi. University of Utrech.
- Safitri, Ilmiawati. (2022). Perjalanan Bioskop Keliling Dari Media Hiburan Hingga Propaganda. *Siginjai: Jurnal Sejarah* Vol. 2 No. 2 Desember 2022.
- Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol. 1, pp. 302-305). University of California Press.